



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sinkronisasi dan optimalisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Balangan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien perlu untuk merubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
 8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
- c) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
- b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
- c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagian Hukum, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD; dan
- b) Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
- b) Sub Bagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Umum, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

2. Bagian Organisasi, terdiri dari :

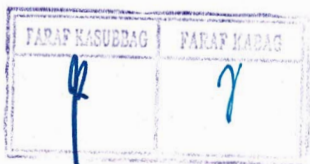
- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;



- b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (3) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Koleksi, Pengumpulan Naskah Kuno dan Koleksi Daerah; dan
 - 2. Seksi Pengolahan Bahan Pustaka.
 - c. Bidang Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Layanan Perpustakaan; dan
 - 2. Seksi Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan.
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - e. Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Alih Media; dan
 - 2. Seksi Konservasi, Perbaikan, dan Perawatan Bahan Perpustakaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



4. Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan, Distribusi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
6. Bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 Nopember 2019

BUPATI BALANGAN,



ttd.

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

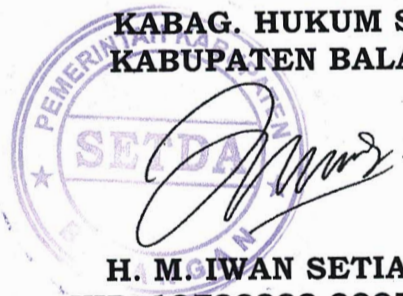


ttd.

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

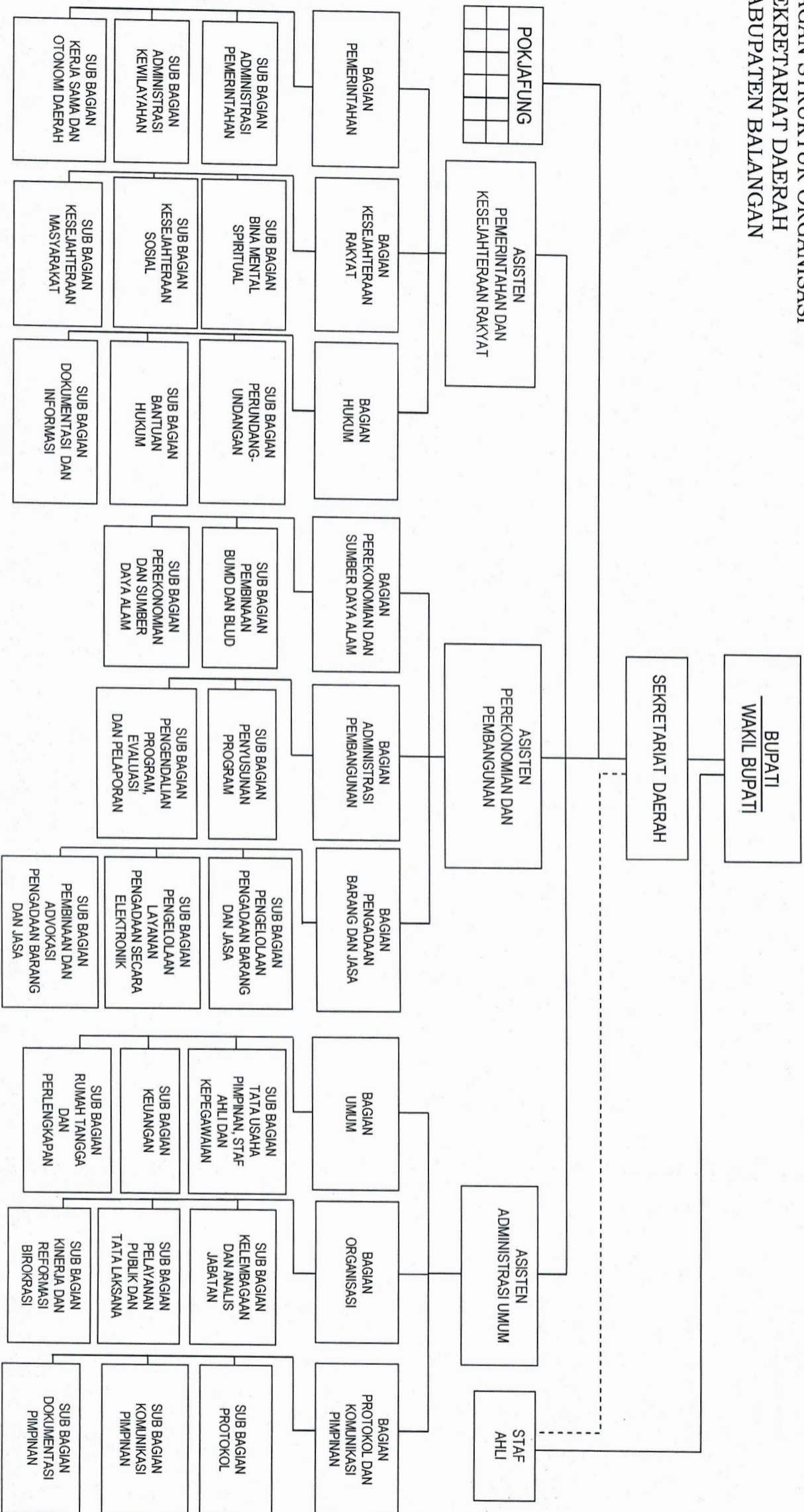
**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



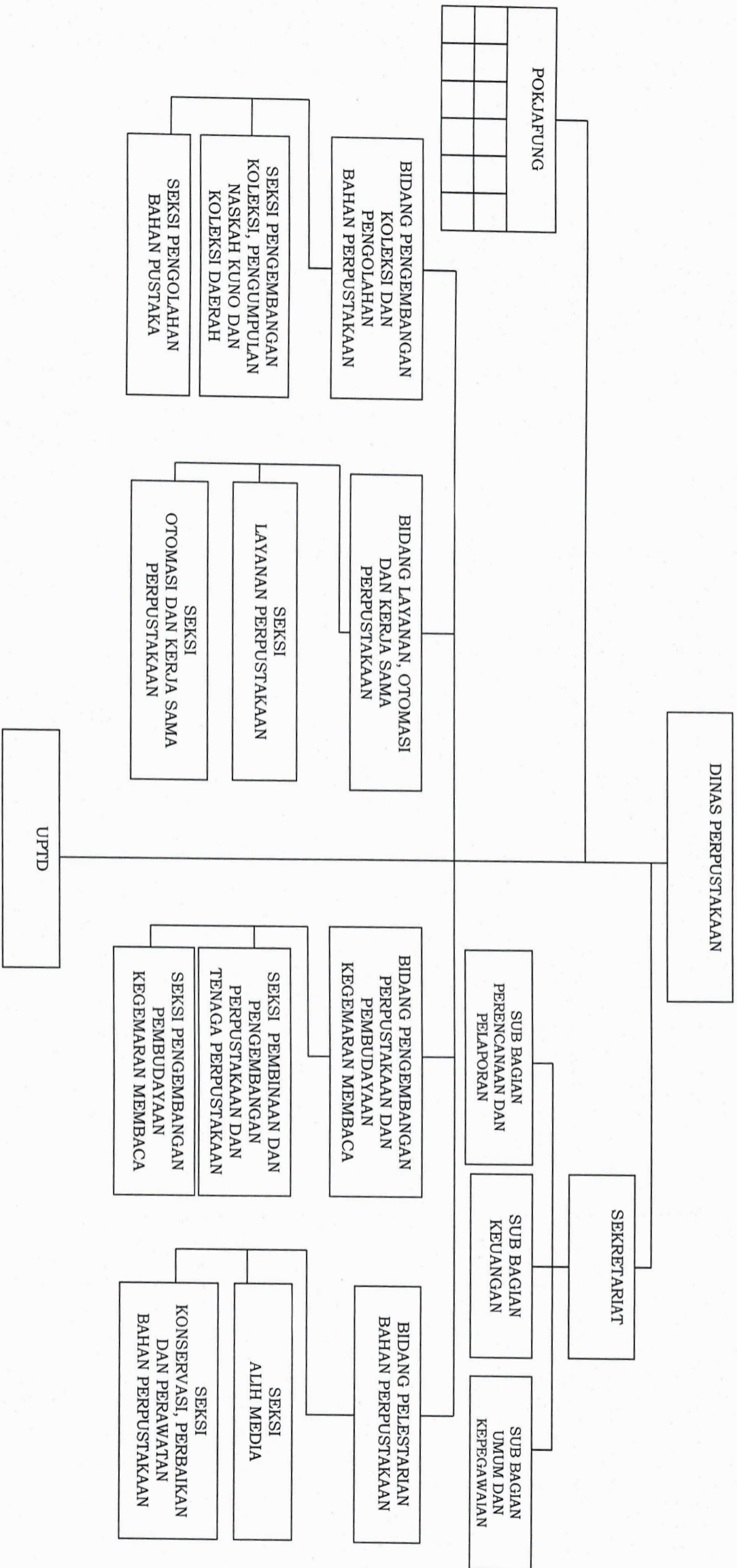
H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

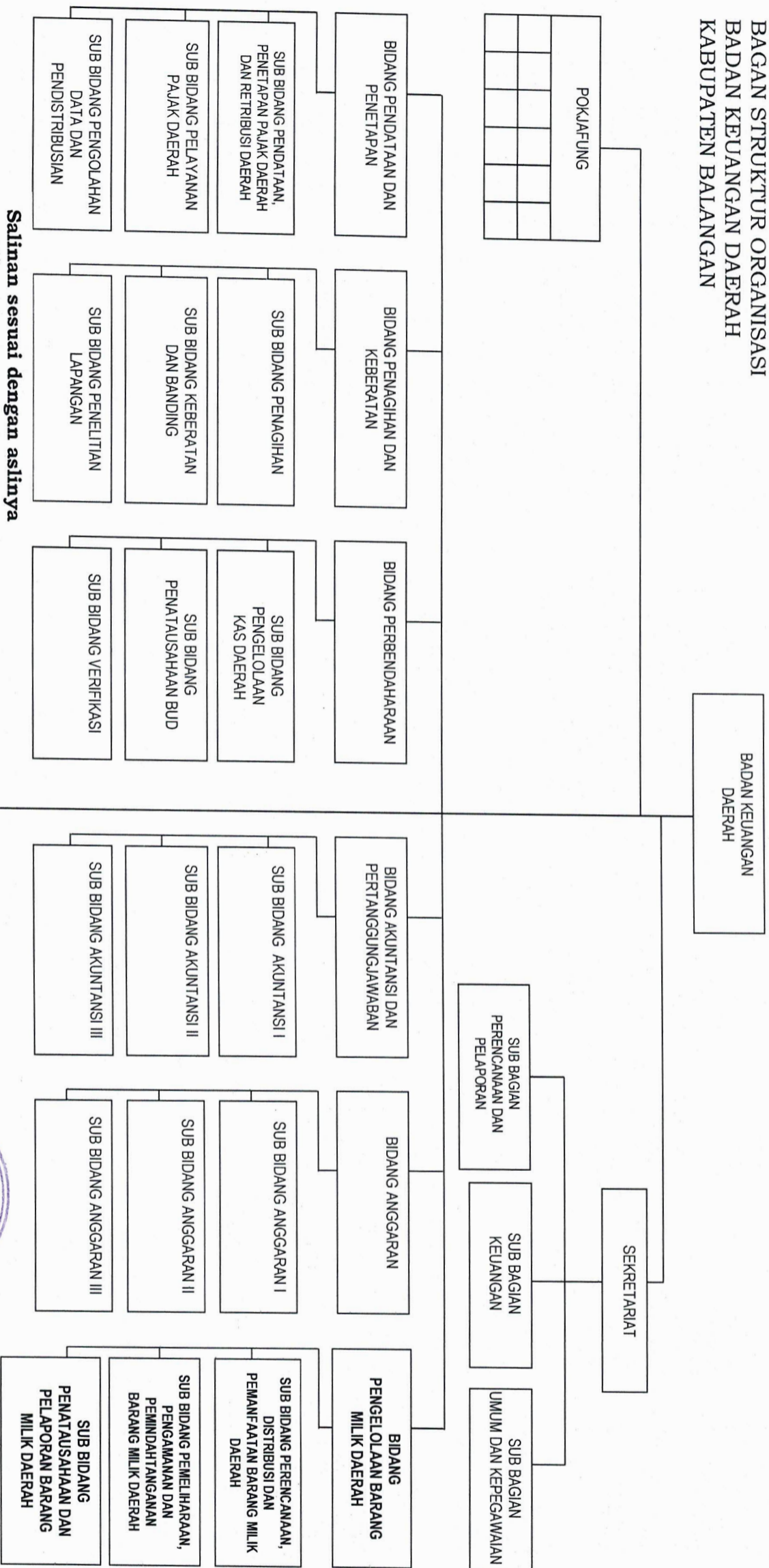
LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN BALANGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN



[Handwritten Signature]

H. M. IWAN SETIADY, SH
 NTP. 19780929 200501 1 009



BUPATI BALANGAN,
 H. ANSHARUDDIN